

# KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH

DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS GUNADARMA  
JAKARTA

## KEBIJAKAN SELAMA PERIODE 1966 - 1969

Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari paham-faham komunisme.

Titik berat

1. Penurunan tingkat inflasi
2. Proses produksi yang tidak efektif dan efisien
3. Penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan

## KEBIJAKAN PELITA 1

1. PP No. 16 Tahun 1970 → penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.
2. PP bulan Agustus 1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika → sasaran :
  - Kestabilan harga bahan pokok.
  - Peningkatan nilai ekspor
  - Kelancaran impor
  - Penyebaran barang di dalam negeri

## KEBIJAKAN PELITA II

Fokus : perkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah dan mendorong pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan Kredit Investasi Kecil (KIK).

Kebijakan Fiskal : penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri.

**Hasil** : cadangan devisa naik dari \$ 1,8 milyar menjadi \$ 2,58 milyar  
naiknya tabungan pemerintah dari Rp. 255 milyar menjadi Rp. 1.522 milyar.

## Lanjutan .....

Kebijakan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) → kebijakan moneter untuk meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor karena :

- a. Tingkat rata-rata inflasi 34%.
- b. Resesi dan krisis dunia tahun 1979.

KNOP 15 juga didukung oleh devaluasi rupiah dari Rp. 415 per US dolar menjadi Rp 625 per US dolar. Serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan penolong dan peningkatan bea masuk untuk komoditi impor lainnya

## KEBIJAKAN PELITA III

Devisitnya Neraca Perdagangan karena proteksi dan kuota dari negara-negara pasaran komoditi Indonesia.

Kebijakan Pemerintah :

1. Paket Januari 1982: tata cara pelaksanaan ekspor –impor dan lalu lintas devisa → kemudahan pajak untuk komoditi ekspor dan kredit ekspor. Kebijakan ini tidak berhasil karena ada resesi dunia yang belum berakhir.

## Lanjutan .....

2. Paket kebijakan imbal-beli (*counter purchases*) untuk menunjang kebijakan di atas. Dimana ada keharusan eksportir dan importir luar negeri untuk membeli produk-produk Indonesia dengan jumlah yang sama
3. Kebijakan devaluasi 1983 dari Rp. 625/US dolar menjadi Rp. 970/US dolar dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekspor dan meningkatkan industri dalam negeri.

## KEBIJAKAN PELITA IV

1. Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985 → meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :
  - Pemberantasan pungli.
  - Mempermudah prosedur kepabeanan.
  - Menghapus dan memberantas biaya siluman.
2. Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM): mendorong sektor swasta dibidang ekspor dan penanaman modal.
3. Paket Devaluasi 1986 : karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negeri.

## Lanjutan .....

4. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara :
  - Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku.
  - Proteksi produksi yang lebih efisien.
  - Kebijakan penanaman modal.
5. Paket Kebijakan 15 Januari 1987 → peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas: langkahnya:
  - Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor.
  - Pembebasan dan keringanan bea masuk,
  - Penyempurnaan klasifikasi barang.

## Lanjutan .....

6. Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) : restrukturisasi bidang ekonomi dalam rangka memperlancar perijinan (deregulasi).
7. Paket 27 Oktober 1988 : kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.
8. Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) : deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.
9. Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES) : kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi

## KEBIJAKAN PELITA V

Pengarahan pada pengawasan, pengendalian dan upaya produktif untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II

## KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

### KEBIJAKAN MONETER:

Sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui JUM dan tingkat bunga.

- a. Kebijakan Moneter Kuantitatif.  
Mengatur JUB dan tingkat bunga melalui:
  1. operasi pasar terbuka melalui SBI.
  2. merubah tingkat bunga diskonto.
  3. merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum

## KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

### b. Kebijakan Moneter Kualitatif.

mengatur dan menghimbau pihak bank umum / lembaga keuangan lainnya baik manajemen maupun produk yang ditawarkan untuk mendukung kebijakan moneter kuantitatif bank Indonesia

## KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

### KEBIJAKAN FISKAL

Tindakan pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui anggaran belanja negara.

#### Macam:

1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
2. Pajak regresif, sebanding dan progresif.
3. Penerimaan pemerintah, pengendali tingkat pengeluaran masyarakat
4. Untuk lebih pemeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

## KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DI SEKTOR LUAR NEGERI

### Kebijakan Menekan Pengeluaran

Dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi.

Cara :

- a. Meningkatkan pajak pendapatan.
- b. Meningkatkan tingkat bunga.
- c. Mengurangi pengeluaran pemerintah.

## KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DI SEKTOR LUAR NEGERI

### Kebijakan Memindahkan Pengeluaran

Cara :

1. Memaksa.
  - a. Mengenakan tarif dan atau kuota.
  - b. Mengawasi pemakaian valuta asing.
2. Rangsangan.
  - a. Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman.
  - b. Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri.
  - c. Melakukan devaluasi